

DISPOSISI PEJABAT PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI DESA PARIT RADEN KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:
DENI TRIYADI
NIM. E42011010

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : triyadi.deni@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui disposisi Pejabat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah pada Pembangunan khususnya Pembangunan Jalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disposisi pejabat pemerintah dalam implementasi program PNPM-MP sangat penting guna untuk mensukseskan program PNPM-MP ini. Keberhasilan dalam implementasi program PNPM-MP ini berpacu terhadap pejabat pemerintah dalam menyikapi penyelenggaraan dari program PNPM-MP tersebut. Adanya sikap mendukung, sikap menolak, kejujuran, serta komitmen yang tinggi yang dimiliki perajabat pemerintah dalam implementasi program PNPM-MP ini berdampak pada keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan program PNPM-MP.

Kata-Kata Kunci : Implementasi Program, Disposisi Pejabat Pemerintah, Program PNPM-MP, Sikap Mendukung, Komitmen yang tinggi

DISPOSITION OF GOVERNMENT OFFICIALS IN IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS (PNPM-MP) IN PARIT RADEN VILLAGE OF SUNGAI KUNYIT SUB-DISTRICT MEMPAWAH DISTRICT

Abstract

This Scription aims to determine the disposition of village government officials in the implementation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas (PNPM-MP) in Parit Raden Village Sungai Kunyit Sub-District Mempawah District, especially on road construction. The result shows that the disposition of government officials in the implementation of the PNPM-MP program is very important in order to make the PNPM-MP program successful. The success in the implementation of the PNPM-MP program is race towards government officials in addressing the implementation of the PNPM-MP program. The existence of supportive attitude, the attitude of rejecting, honesty, and high commitment that owned by government officials in the implementation of PNPM-MP program is impact on the success in the implementation of PNPM-MP program.

Keywords : Program Implementation, Disposition, Government Officials, PNPM-MP Program, Supports Attitude, High Commitment.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Mengatasi masalah sarana dan prasarana perdesaan Pemerintah pusat menyusun beberapa program salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang diluncurkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono di Palu Sulawesi Tengah pada tanggal 30 April 2007.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ini juga berkaitan dengan Disposisi Pejabat Pemerintah yang mana pejabat pemerintah memiliki sikap untuk mendukung dalam tercapainya beberapa program salah satunya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ini. Berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi tanda kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Disposisi Pejabat Pemerintah juga menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Fungsi keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan

dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan, dalam PNPM-MP ini sikap dan sifat para pejabat pemerintah sangat berperan penting.

Program PNPM-MP ini diluncurkan pada tanggal 30 April 2007 dan berakhir pada bulan Desember 2014, namun sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi dan Peraturan Presiden No. 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, maka tanggung jawab pengelolaan PNPM-MP dialihkan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi.

Upaya untuk mencapai tujuan PNPM-MP, terdapat strategi, prinsip dasar, pendekatan, dan dasar hukum yang perlu menjadi acuan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar yang diemban PNPM-MP sebagaimana termuat dalam pedoman umum PNPM-MP (2010:8) yaitu :

1. Bertumpu pada pembangunan manusia
2. Otonomi
3. Desentralisasi
4. Berorientasi pada masyarakat miskin
5. Kesetaraan dan keadilan gender
6. Partisipatif
7. Transparansi dan akuntabel
8. Prioritas
9. Keberlanjutan

10. Kolaborasi
11. Sederhana.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan, terdapat fenomena yang dapat dilihat di Desa Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah mengenai disposisi pejabat Pemerintah Desa. Fenomena yang diketahui peneliti sebagai berikut :

1. Adanya sikap mendukung dari pejabat pemerintah desa dengan cara pemberdayaan masyarakat.
2. Pejabat Pemerintah Desa mendukung pelaksanaan program tersebut dengan cara mensosialisasikan program ini kepada masyarakat.
3. Adanya komitmen dan tanggung jawab yang tinggi yang dimiliki pejabat pemerintah Desa dalam pelaksanaan program tersebut.
4. Adanya pro dan kontra terhadap keputusan yang diambil dalam perencanaan pembangunan.

Mengetahui secara pasti mengenai fenomena yang terjadi, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mengenai Disposisi Pejabat Pemerintah di Desa Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti memfokuskan penelitian pada disposisi pejabat pemerintah desa dalam mendukung keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di wilayah Kecamatan Sungai Kunyit.

3. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang diangkat, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas adalah : “Bagaimana disposisi pejabat pemerintah desa di wilayah Kecamatan Sungai Kunyit dalam mendukung keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah?”.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui disposisi pejabat pemerintah desa dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada pembangunan jalan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat Di Desa Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

5. Manfaat Penelitian.

a) Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan mengenai Disposisi Pejabat Pemerintah dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) untuk meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat desa. Sehingga bisa menjadi perbandingan terhadap pihak-pihak yang memiliki minat pada permasalahan serupa.

b) Manfaat Pratis

Penelitian ini dapat menjadi koreksi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, khususnya di desa yang memiliki PNPM-MP. Sehingga dapat menjadi masukan terutama terhadap implementasi PNPM-MP yang ada di desa-desa Kabupaten Mempawah.

dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memerikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi (Ekowati, dkk 2005). Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (communications), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (resources), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposition), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic structure).

Menurut Riant Nugroho (2008) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah, yaitu :

- a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program.
- b. melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik terkait

Jones (dalam Widodo, 2008:89) menyebutkan tiga macam aktivitas

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

a) Konsep Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Keberhasilan implementasi suatu kebijakan,

implementasi kebijakan, antara lain sebagai berikut :

b) Aktivitas Pengorganisasian.

Aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan) kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari pada kebijakan tersebut. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dikerjakan dengan berhasil (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2009:82).

c) Aktivitas Interpretasi

Aktivitas interpretasi merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Salah satunya adalah melalui Musrembangdes dimana implementor memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai arah pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa tersebut serta menggambarkan maupun menjelaskan fakta dan data yang terdapat di lapangan serta kemampuan pemerintah dalam memfasilitasinya.

d) Aktivitas Aplikasi

Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lain sebagainya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Aktivitas aplikasi ini terwujud dalam *follow-up* atau tindakan nyata yang dilakukan pihak pemerintah desa setelah dilaksanakannya kegiatan musrembang, seperti contohnya pembangunan yang dilaksanakan yang menjadi agenda pemerintah desa tersebut.

e) Konsep Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Implementator yang memiliki sifat jujur, komitmen dan demokratis akan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementator dan program atau kebijakannya. Implementator harus mampu mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan yang telah dibuat.

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustinus, 2006:162): “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi

kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus di selesaikan”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi disposisi menurut Edward III (dalam Agustinus, 2006:159-160) terdiri dari : Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana yang menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas.

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Disposisi Pejabat Pemerintah dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Desa Parit Raden Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah menggunakan penelitian deskriptif dengan analisa pengolahan data secara kualitatif. Penelitian ini berdasarkan paradigma

kualitatif, karena dalam menjawab persoalan-persoalan yang sebenarnya metode kualitatif lebih tepat dilakukan dari pada sekedar dilakukan dengan angka-angka. Dengan metode ini, peneliti dapat memikirkan apa saja yang akan diteliti di lapangan nantinya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sikap mendukung

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi selama di lapangan menunjukkan bahwa Informasi yang diberikan oleh Pejabat Pemerintah tingkat Kabupaten dalam menyampaikan program PNPM-MP sebenarnya sudah disampaikan sepenuhnya kepada pihak kecamatan. Informasi program PNPM-MP disampaikan melalui sosialisasi dengan mengadakan pertemuan bersama seluruh camat, camat memiliki peran penting dalam mengambil keputusan di dalam program PNPM-MP ini untuk pembangunan di desa.

2. Sikap menolak

Berdasarkan hasil penelitian Menentukan keputusan yang akan diambil dalam program PNPM-MP tentu saja ada terdapat kesenjangan. Pemerintah pada tingkat kabupaten hanya bisa memberi inisiatif mengenai kegiatan pembangunan

apa saja yang telah di tentukan pihak kabupaten, akan tetapi camat dan kepala desa yang memilih pembangunan apa yang cocok di bangun di desa. Camat dan kepala desa memiliki peran penting dalam meminta dan memilih keputusan di dalam program PNPM-MP ini khususnya pada pembangunan, karena camat dan kepala desa lebih mengetahui pembangunan apa yang masih belum ada terdapat di desa.

Menentukan keputusan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di desa terkait program PNPM-MP ini dapat disampaikan melalui pertemuan yang sifatnya berjenjang antara pertemuan dari kabupaten ke camat, kemudian camat ke desa sampai desa ke masyarakat mengenai program yang cocok untuk di bangun di perdesaan.

3. Kejujuran

Kepatuhan untuk mentaati perintah yang telah diberikan merupakan peranan penting dalam melaksanakan sebuah program. Pelaksanaan program PNPM-MP ini kepatuhan terhadap atasan sangat diperlukan untuk saling menghormati dan menghargai di dalam roda pemerintahan. Mentaati setiap perintah-perintah yang telah diberikan sudah harus sewajarnya dilakukan, karena dalam menjalankan program PNPM-MP keterkaitan antara pejabat pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai suatu hubungan yang baik antar pejabat pemerintah. Kepatuhan dari

pemerintah tingkat desa mengenai perintah yang telah diberikan dari pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten harus dilakukan untuk memudahkan berinteraksi antara pejabat pemerintah demi kemudahan menjalankan program PNPM-MP ini.

4. Komitmen yang tinggi

Mengimplementasikan sebuah kebijakan hendaknya memiliki komitmen yang tinggi guna untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program PNPM-MP. Program PNPM-MP yang dibuat oleh pemerintah berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, dalam pelaksanaan program PNPM-MP khususnya pembangunan jalan di Desa Parit Raden ini, pejabat pemerintah sebagai sumber penentu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan di Desa Parit Raden harus memiliki suatu komitmen yang tinggi agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dapat terselesaikan dengan maksimal dan mencapai tujuan yang diinginkan dari program PNPM-MP ini

D. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

a) Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Sikap Mendukung, Implementasi Program PNPM-MP dari semua pejabat pemerintah terdapat saling memberi dukungan untuk menyelenggarakan program PNPM-MP yang dilaksanakan di perdesaan. Dapat dilihat dari kerjasama pihak pemerintah dalam memberikan arahan dan masukan serta mensosialisasikan mengenai program PNPM-MP ini.
2. Sikap Menolak, Adanya kesenjangan dalam menentukan keputusan pelaksanaan program . PNPM-MP yang akan diambil, dari pihak pemerintah kabupaten telah memberikan inisiatif pembangunan infrastruktur untuk dilaksanakan di perdesaan. Dalam hal ini dari pihak desa lebih meminta pembangunan jalan yang dilaksanakan.
3. Kejujuran, keterbukaan dalam mengimplementasikan program diperlukan untuk mengetahui keberlangsungan pelaksanaan pada pembangunan fisik program PNPM-

MP, pentingnya pengambilan suatu kebijakan tanpa mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan tidak terdapat.

4. Komitmen yang tinggi, keberhasilan dalam melaksanakan program PNPM-MP pada pembangunan adanya rasa tanggung jawab dan kesungguhan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan menciptakan program PNPM-MP dapat terlaksana dengan baik.

b) Saran

Berdasarkan permasalahan yang muncul maupun hal - hal yang berpotensi menjadi masalah dari pelaksanaan Program Pembangunan Jalan di Desa Parit Raden, peneliti merekomendasikan beberapa saran, adapun saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu :

1. Pada implementasi PNPM-MP di Desa Parit Raden hendaknya masyarakat harus lebih giat dan rutin lagi untuk melakukan gotong royong dalam pembangunan jalan tanpa lebih mementingkan kepentingan pribadi masyarakat juga harus dituntut untuk lebih giat lagi dalam mengerjakan menyelesaikan pembangunan jalan ini sehingga masyarakat benar-benar terlibat serta merasa diberdayakan karena pada dasarnya PNPM-MP ini

dibuat memang untuk mensejahterakan masyarakat dengan masyarakat turut terlibat aktif dalam program itu, tidak hanya sebagai penerima manfaat dari program yang dibuat.

2. Pemerintah desa seharusnya lebih sering lagi memberikan informasi kepada pihak kecamatan mengenai kondisi dan keadaan di lapangan dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Parit Raden guna untuk memudahkan pihak kecamatan mengetahui kondisi dan kendala yang terdapat di lapangan.

c) Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi PNPM-MP di Desa Parit Raden, terdapat keterbatasan-keterbatasan yang peneliti alami. Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pada penelitian ini peneliti tidak membahas PNPM-MP secara menyeluruh tapi hanya dibatasi pada Disposisi Pejabat Pemerintah dalam program Pembangunan Jalan, sehingga peneliti tidak bisa menggambarkan bagaimana implementasi PNPM-MP secara menyeluruh.
2. Kurang terampilnya peneliti dalam penyusunan kata-kata sehingga peneliti cukup mengalami kesulitan untuk

menuangkan ide atau hasil pemikiran peneliti

3. Keterbatasan lain yang peneliti rasakan yaitu peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan penelitian ini dapat disempurnakan.

d) Apresiasi

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, pengasuh, pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, khususnya Pemerintah Desa Parit Raden.

E. REFERENSI

1. Buku-Buku

Agustino, Leo. 2006. **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**. Bandung : CV Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Jakarta : Gramedia.

Ekowati, dkk. 2005. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi kebijakan atau program*. Surakarta : Pustaka Cakra.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.

Tanuru, La. 2011. *Tesis : implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha di kota baubau*. Kendari. Melalui <http://www.pustaka.ut.ac.id/pdfthesis/40676.pdf> diakses tanggal 30/05/2015.

Terry, Rue. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tohardi, Ahmad. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Prodi IP*. Pontianak :Fisip UniversitasTanjungpura.

Widodo, Joko. 2008.*Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

2. Sumber Dokumen dan Perundang-undangan

-----, 2010. *Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2009-2014*.

-----, 2007. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MP)*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Deni Triyadi
NIM / Periode Lulus : E42011010 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : triyadi.deni@yahoo.co.id / 085252380503

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**DISPOSISI PEJABAT PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI DESA PARIT RADEN KECAMATAN SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

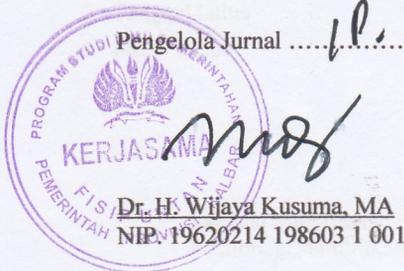
Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal*p.p.*.....

Dibuat di : Pontianak

Pada Tanggal : Desember 2015



Deni Triyadi
(Deni Triyadi)